

DAFTAR PUSTAKA

er

BUKU

- Ali, M. (2009). *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Sasing Tinggi*. Jakarta: Grasindo.
- dkk, K. (2005). *Teknologi Konservasi Tanah dan Air*. Jakarta: Rineka Cipta.
- dkk, N. A. (2023). *Kajian Ekspor Pasir Laut*. Semarang: Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro.
- dkk, R. N. (2024). *Green Economy Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang di Masa Depan*. Sonpedia Publishing.
- dkk, S. S. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka.
- Galang, S. d. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Husrin, J. P. (2014). *Penambangan Pasir Laut*. Bogor: 30.
- Indonesia, M. o. (2020). *Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan untuk Sektor Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Indonesia Care.

Kehutanan, K. L. (2016). Daya Dukung dan Daya Tampung Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Ekoregion Kalimantan Berbasis Jasa Ekosistem. *Pusat Pengendalian Pembangunan*, 8.

Krier, R. S. (1978). *Environmental Law and Policy*. New York: New York The Boobs Merrill co.

Muhtadi, A. (2017). *Ekosistem Pesisir dan Laut*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Mukhtasor. (2007). *Pencemaran Pesisir dan Laut*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Nikson, W. (2009). *Kewenangan dan Identitas Lembaga Penjaga Laut dan Pantai Sebagai Penegak Hukum Keselamatan*. Jakarta: Bakorkamla.

Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Siahaan, N. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.

Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Yudhistira, N. H. (2023). *Siapa Untung dari Ekspor Pasir Laut?* Jakarta: Cellios.

ARTIKEL JURNAL

B, H. J. (2005). Memahami Filantropi Keadilan Sosial. *Galang*, 9.

- Balenina, C. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri di Desa Kalisoro Tawangmangu, Kabupaten Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 26.
- Change, I. P. (2021). *Climate Change Widespread, Rapid, and Intensifying*.
- dkk, A. J. (2019). Penarapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 14.
- dkk, A. K. (2019). Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten Dalam Invensi Bidang Obat-Obatan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 259.
- dkk, I. (2024). Potensi Kerawanan Kenaikan Permukaan Air Laut di Kawasan Pesisir Kecamatan Paju'kuknag Kabupaten Batang. *Journal of Green Complex Engineering*, 40.
- dkk, N. A. (2016). Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6.
- dkk, T. H. (2019). Bank Participation in Managing Environmental Recovery Guarantee Funds in Order to Realize the Sustainable Development Goals. *Icgglow*, 9-13.
- dkk, W. W. (2018). Strategi Pengelolaan Penambangan Pasir Laut yang Berkelanjutan (Studi Kasus PULau Tunda, Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Pengathuan IPB*, 280.

- dkk, Z. E. (2018). Pengaruh Penambangan Pasir Laut Terhadap Kekeruhan Perairan Teluk Banten Serang. *Jurnal Segara*, 35-42.
- Ihsan, S. d. (2018). Proses Penambangan Pasir Pantai dan Dampaknya Terhadap Lingkungan di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. *Jurnal Pendidikan*, 72.
- Joesidawati. (2016). Penilaian Kerentanan Pantai di Wilayah. *Jurnal Kelautan*, 189.
- Lasabuda, R. (2013). Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Prespektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, 3.
- Latuconsina, H. (2010). Dampak Pemanasan Global Terhadap Ekosistem Pesisir dan Lautan. *Jurnal Agribisnis Perikanan*, 35.
- Mansar, A. R. (2024). Tindak Pidana Pertambangan Pasir Laut Pasca Pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. *Jurnal Pencerah Bangsa*, 194.
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Fakultas Hukum Pelita Harapan*, 87.
- Mukhidin. (2014). Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 267.
- Namang, R. B. (2020). Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 250.

- Naranta, E. H. (2024). Pengaruh Inkonsistensi Kebijakan Ekspor Pasir Laut terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Ekologis. *Prosiding Seminar Nasional PDIH UMS* (p. 30). Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Nuryanti, D. S. (2020). Review Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Studi Kasus Kajian Lingkungan Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040. *Prosiding Seminar Nasional*, (p. 125).
- Nurzal, E. R. (2004). Upaya Penanganan Pasir Laut dari Sisi Kebijakan . *Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi*, 215.
- Priyanta, M. (2021). Implikasi Konsep Kesusaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan . *Jurnal Wawasan Yuridika*, 22.
- Purwaka, T. H. (2014). Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Republik Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 10.
- Rahardjo, C. (2025). Analisis Ganti Kerugian Nelayan Akibat Kebijakan Ekspor Pasir Laut Melalui Gugatan Perdata Kepada Pemerintah . *Mustika Raja Law Office*, 35.

- Rahmat, R. (2018). Penambangan Pasir Laut (Sejarah, Pengaturan, dan Dampak. *Jurnal INA*, 15.
- Rangga, A. C. (2024). Aqua Bot GUARD: Upaya Filtrasi Hasil Sedimentasi Laut yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan bagi Ekosistem di Laut. *Indonesian Conference of Maritime*, (p. 550).
- Redi, A. (2015). Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam. *Jurnal Konstitusi*, 410.
- Robison, R. (1990). *Power and Economy in Suharto's Indonesia*. Manila: Journal of Contemporary Asia Publishers.
- Rudyanto, A. (n.d.). Kerangka Kerjasama Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut. *Jurnal Academia Edu*, 20.
- Sahputra, Y. E. (2024). *Mengancam Lingkungan dan Berkonflik Sosial, Nelayan Kepri Tolak Penambangan Pasir Laut*. Batam: MONGABAY.
- Sari, D. L. (2023). Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem HUKUM. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 408.
- Sayudi, A. (2017). Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum*, 203.

- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* , 2861.
- Surono, A. J. (2023). Pengaruh Kebijakan Ekspor Sedimentasi Pasir Laut Terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta*, 71.
- Umam, A. K. (2020). Tantangan Integritas Bisnis Tambang di Indonesia. *Jurnal Universitas Paramadina*, 13.
- Wahyudi, D. (2016). Strategi Konsep Ekonomi Hijau Sebagai Sustainable Develpment Goals di Indonesia. *Prosiding Seminar STIAMI*, (p. 36).
- Winarno, A. d. (2023). Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Keamanan Laut. *Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara*, 35.
- Yorisca, Y. (2020). Pembangunan Hukum Berkelanjutan: Usaha Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 90.

TESIS/SKRIPSI

- Amarin, S. Y. (2024). Politik Hukum Ekspor Pasir Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Masalah Mursalah. *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.

Azis, H. Y. (2011). Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Rumput Laut di Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. *Disertasi Institut Pertanian Bogor*.

INTERNET

Muzakki, M. R. (2024). *Riset Celios: Ekspor Pasir Laut Menguntungkan Pengusaha, Bukan Negara*. Jakarta: Tempo.

Putra, H. R. (2024). *KKP Verifikasi 66 Perusahaan Pemohon Ekspor Pasir Laut, Volume Ditaksir 3 Miliar Meter Kubik*. Jakarta: Tempo.

Riau, W. L. (2022). *WALHI Riau: Aktivitas Tambang Pasir Laut Menambah Ancaman Terhadap Pulau Rupa*. Riau: WALHI.

Taufiqurrahman. (2016). *Pasir Disedot untuk Reklamasi Jakarta, Nelayan Banten Protes*. Liputan 6.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor

27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakkan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia Indonesia dan Yurisdiksi Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/P/HUM/2025.

